



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



**KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024. Kami menyadari bahwa materi Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan sebelumnya maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Terimakasih atas kerjasama semua pihak sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan, pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 ini. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Perubahan ini masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan, saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak serta OPD terkait pada Pemerintah Kota Denpasar guna penyempurnaan Penyusun Renja Perubahan dimasa mendatang.

Denpasar, 8 Mei 2024

Plt. Camat Denpasar Selatan



Ketut Sri Karyawati, S.KM.,M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19710626 199402 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang..... 1
1.2	Landasan Hukum..... 2
1.3	Maksud dan Tujuan..... 4
1.4	Sistematika Penulisan..... 4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2024
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan OPD Tahun Lalu dan Capaian Rentra PD Tahun 2024..... 6
2.2	Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 14
2.3	Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..... 16
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP..... 62
.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 ini merupakan penjabaran Awal daripada rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, Renja Perubahan perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan rancangan Renja Perubahan ini berdasar pada rancangan awal RKPD dan rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026 Kecamatan Denpasar Selatan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan ini di dalamnya telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2021 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2022. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis Kecamatan Denpasar Selatan, baik di Kota Denpasar, Provinsi Bali maupun Nasional.

Dimana dalam tahun 2021 adanya pandemic virus corona 19 (covid -19), yang menyebabkan lumpuh nya sector pariwisata tentu saja hal tersebut sudah tentu berimbas kepada semua stekholder yang mengandalkan sekktor pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Denpasar Selatan dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan perubahan struktur sesuai dengan Visi dan Misi Kota Denpasar melalui Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan, dengan Misinya ; Penguatan jati diri

masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali; Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan local; peningkatan pelayanan public yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*); peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan; dan penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan tri Hita Karana, yang mana reformasi pada sektor ekonomi pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Strategis yang mengarahkan semua unsur yang mempengaruhi Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) berdasarkan hal tersebut, disusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan berpedoman pada :

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M,PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M,PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 5 Tahun 2021);

15. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24);
16. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);
17. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024.;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan dimaksud sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan prinsip-prinsip *good govenance* (penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme) sesuai dengan Visi dan Misi.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2024, yang merupakan penjabaran tahun pertama dari pada Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021-2026. Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran awal apa yang akan dilakukan oleh Kecamatan Denpasar Selatan pada Tahun 2024 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Kecamatan Denpasar Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perubahan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan Kota
Denpasar Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Denpasar Selatan Kota
Denpasar Kota Denpasar
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Denpasar Selatan Kota Denpasar

Bab III. Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

Lampiran

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Triwulan I Tahun 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Triwulan I Tahun 2024

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Renja Perubahan Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi Renja Perubahan dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan sudah dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan, walaupun belum dapat berjalan secara maksimal daripada target yang telah ditetapkan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 6 (Enam) program dengan 11 (Sebelas) kegiatan dengan 28 (dua puluh Delapan) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 30.986.559.995,-. Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan I, realisasi secara fisik sudah mencapai 19.46% dan realisasi keuangan sebesar 16.13%. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja Perubahan) sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Secara keseluruhan kegiatan sedang berjalan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

- Dalam pencairan anggaran masih belum berpatokan pada Rencana Anggaran Kas masih ada anggaran yang di cairkan tidak tepat dengan anggaran KAS
- SDM masih menyesuaikan dengan sistem pengamprahan yang baru sehingga masih ada banyak kesalahan – kesalahan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu, dimana secara tidak langsung kita dapat melihat bahwa kecilnya persentase Realisasi .

6. Kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Strategi pemecahan masalahnya adalah :

- Menekankan Kepada PPTK di Kecamatan dan Kelurahan untuk lebih mengacu pada Rencana Anggaran Kas dalam melakukan pencairan anggaran.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Kecamatan Denpasar Selatan Triwulan I Tahun 2024 Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
Kota Denpasar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Pagu	Target	Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2024		Sisa Anggaran
									Fisik (%)	Keuangan	
1					2	3	4	5	6	7	8 = 4 -7
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	24.593.265.510.00	100	17.73	4.360.374.705.00	20.232.890.805.00
7	1	1	2.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	13.895.572.291.00	100	21.43	2.461.581.668.00	11.433.990.623.00
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	13.895.572.291.00	80 orang	21.43	2.461.581.668.00	11.433.990.623.00
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	0	1 orang	0	0	0
7	1	1	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pelatihan	0		0	0	-
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan ASN	0		0	0	-
7	1	1	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	1.316.585.000.00	100	18.20	239.561.250.00	1.077.023.750.00

7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	25.015.500.00	100	25.00	4.447.500.00	20.568.000.00
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	976.893.000.00	100	20.52	182.158.800.00	794.734.200.00
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	239.436.500.00	100	16.32	35.224.950.00	204.211.550.00
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	75.240.000.00	100	23.68	17.730.000.00	57.510.000.00
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	196.779.000.00	100	8.74	17.200.000.00	179.579.000.00
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	196.779.000.00	100	8.74	17.200.000.00	179.579.000.00
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	7.992.158.844.00	100	19.02	1.519.917.287.00	6.472.241.557.00
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	520.010.400.00	100	23.08	92.352.129.00	427.658.271.00
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	43.743.000.00	100	20.6	7.980.00.00	35.763.00.00
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	7.428.405.444.00	100	21.62	1.419.585.158.00	6.008.820.286.00

7	1	1	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	<i>1.192.170.375.00</i>	100	<i>10.24</i>	<i>122.114.500.00</i>	1.070.055.875.00
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	45.860.000.00	100	22.33	10.045.000.00	35.815.000.00
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	574.061.000.00	100	20.26	82.575.500.00	491.485.500.00
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	3.540.000.00	100	0.00	0.00	0.00
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	231,139,375.00	100	8.65	19.500.000.00	211,639,375
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	337.570.000.00	100	3.96	9.994.000.00	327.576.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan	361.069.250.00	100	64.33	160.467.250.00	200.602.000.00
7	1	2	2.01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	meningkatnya persentase pembangunan daerah dan Pemberdayaan Masyarakat	<i>214.763.250.00</i>	100	<i>21.45</i>	<i>46.056.250.00</i>	168.707.000.00

7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	48.350.250.00	100	100	41.475.250.00	6.875.000.00
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat	166.413.000.00	100	2.64	4.581.000.00	161.832.000.00
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Survey Kepuasan Masyarakat	146.306.000.00	100	78.56	114.411.000.00	31.865.000.00
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (PATEN DII)	Pembinaan Pelayanan Publik yang tersedia	146.306.000.00	100	78.56	114.411.000.00	31.865.000.00
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	4.610.754.335.00	100	6.03	277.933.450.00	4.332.820.885
7	1	3	2.02		Pemberdayaan Kelurahan	meningkatnya persentase pembangunan daerah	4.610.754.335.00	100	6.03	277.933.450.00	4.332.820.885
7	1	3	2.02	1	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	13.954.350.00	100	0.00	-	13.954.350.00
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	2.158.667.485.00	100	0.00	0.00	2.158.667.485.00
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	2.438.132.500.00	100	20.66	277.933.450.00	2.160.199.050.00
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.217.667.750.00	100	18.01	192.435.000.00	1.025.232.750.00

7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase kasus yang ditangani	1.217.667.750.00	100	18.01	192.435.000.00	1.025.232.750.00
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	1.217.667.750.00	100	18.01	192.435.000.00	1.025.232.750.00
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	187.978.150.00	100	3.22	6.055.000.00	181.923.150.00
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintah umum	187.978.150.00	100	3.22	6.055.000.00	181.923.150.00
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan kebangsaan	160.978.150.00	100	0.44	2.200.000.00	135.278.150.00
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Form Kordinasi kecamatan	27.000.000.00	100	14.29	3.855.000.00	23.145.000.00
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	meningkatnya persentase pembangunan daerah	15.825.000.00	100	0.00	0	15.825.000.00

7	1	6	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa</i>	<i>15.825.000.00</i>	100	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>15.825.000.00</i>
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	kegiatan pemerintah yang dilimpahkan kepada kecamatan yang difasilitasi	15.825.000.00	100	0.00	-	15.825.000.00
Total							30.986.559.995.00	100	19.46	4.997.295.405.00	25.965.764.590.00

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Denpasar Selatan merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang.

Sebagaimana yang terurai pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026 bahwa Kecamatan Denpasar Selatan mengacu pada Misi ke-3 “3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”.

Atas dasar strategi dan arah kebijakan sebagaimana yang tercantum pada Rancangan Awal RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran yang ingin di capai oleh Dinas Sosial Kota Denpasar ialah :

Tujuan :

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan”

Sasaran :

- 1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat**
- 2. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah**
- 3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa**

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Denpasar telah disajikan melalui tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Capaian IKU Kecamatan Denpasar Selatan

No	Indikator	SPM standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	
2	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat		Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat		100%	100%	100%		100%	100%	100%	
3	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah		Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah		100%	100%	100%		100%	100%	100%	
4	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		100%	100%	100%		100%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kecamatan Denpasar Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya.

Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kecamatan Denpasar Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

Pertumbuhan wilayah yang sangat dinamis dan cepat, tetapi dengan keterbatasan ketersediaan lahan non pertanian menjadikan permasalahan yang kompleks di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Sehingga alih lahan pertanian menjadi non pertanian yang nantinya dipergunakan sebagai area perumahan pemukiman baru. Faktor wilayah

Kecamatan Denpasar Selatan sebagai wilayah aglomerasi perkotaan menjadikan daya tarik tersendiri bagi konsumen perumahan dan kalangan bisnis property. Salah satu upaya dengan permasalahan keterbatasan lahan dengan banyaknya pembangunan. Plus minus adanya hunian vertikal adalah faktor dampak sosial.

A. Kondisi Eksternal dan Internal Dari gambaran umum di atas perlu diungkapkan dengan jelas faktor-faktor penentu keberhasilan. Perumusan faktor-faktor kunci keberhasilan dilakukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur strategis yang dapat memberikan muatan untuk proses pencapaian visi dan misi Kecamatan Denpasar Selatan.

Dengan menggunakan analisis SWOT diperoleh gambaran lingkungan internal dan eksternal guna penetapan kunci-kunci keberhasilan sebagai berikut :

1 .Kondisi Internal

1) Potensi yang dimiliki (Kekuatan/Strength)

- Potensi luas wilayah yang merupakan pengembangan area bisnis, jasa dan pendidikan dapat menjadikan penggerak roda perekonomian masyarakat setempat baik dengan usaha dibidang property, kuliner maupun penginapan (kost-kostan dan hotel)
- Kemampuan masyarakat yang tinggi dalam berkreasi dan berinovasi untuk meningkatkan penghasilan dengan berbagai sumber daya yang ada.
- Karakteristik masyarakat yang aspiratif.
- Aspek penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan pegawai yang memadai dan relatif berkualitas di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- Adanya sumber dana APBD.
- Motivasi kerja pegawai cukup tinggi.
- Jelasnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Denpasar Selatan.

2) Kelemahan (Weakness)

- Pemanfaatan lahan yang berorientasi ekonomi dan cenderung mengabaikan ekosistem/kelestarian lingkungan.
- Dorongan dan kemauan yang masih lemah pada masyarakat dalam upaya meningkatkan penghasilan.
- Jumlah dan kualitas pegawai kurang dibarengi dengan disiplin, upaya pemeliharaan skill (kemampuan & ketrampilan) yang kontinyu dalam penyesuaian dengan tuntutan/dinamika masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik/prima dari aparat pemerintah.

- Pengolahan manajemen pemerintah yang belum efektif dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan, sumber daya organisasi (aparatur, dana dan peralatan) kurang dapat dimanfaatkan secara efisien, sehingga terjadi tugas dan fungsi yang kurang tertangani.

2. Kondisi Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

1. Image tentang kawasan Kecamatan Denpasar Selatan yang merupakan perkembangan kawasan kota menjadikan nilai lahan selalu meningkat.
2. Pemahaman akan kedudukan Kecamatan pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dari masyarakat, desa, instansi sentral terkait di Kecamatan.
3. Partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah mampu memenuhi kebutuhan bersama lingkungan sekitarnya dalam kehidupan masyarakat masih tinggi.

B. Tantangan (Threats)

1. Belum termanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya yang ada baik dengan tujuan ekonomis maupun pelestarian lingkungan.
2. Tuntutan pelayanan publik yang harus selalu lebih baik dari masyarakat, tanpa melihat sumber daya organisasi.
3. Kondisi kesehatan lingkungan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang masih perlu mendapat prioritas dan perhatian.
4. Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat masih perlu perhatian.

Kondisi Aparatur Keberadaan Pegawai pada Kecamatan Kecamatan Denpasar Selatan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Pegawai sumber daya manusia merupakan salah satu komponen untuk mencapai kesuksesan suatu tujuan. Peran pegawai yang merupakan pemikir, perencana dan pelaksana keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

amat menentukan keberhasilan pencapaian visi, misi, dan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar. Sumber daya manusia pada Kecamatan Denpasar Selatan yang ada pada saat ini diberdayakan seoptimal mungkin untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

C. Permasalahan Pelayanan

Permasalahan pelayanan di Kecamatan Denpasar Selatan diuraikan dalam klasifikasi tiap-tiap Seksi sebagai berikut :

1. Sekretariat Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat antara lain:

- a. Pengelolaan arsip yang belum optimal.
- b. Pengelolaan perpustakaan yang belum optimal
- c. Pengelolaan keuangan yang belum optimal.
- d. Perencanaan yang kurang optimal.
- e. Pengelolaan dokumen kepegawaian yang belum optimal
- f. Perlu data monografi yang valid untuk penentu kebijakan

2. Seksi Pemerintahan

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemerintahan antara lain:

- a) Masih sering terjadinya konflik konflik pertanahan.
- b) Meningkatnya pemanfaatan tanah yang belum berizin.
- c) Masih lemahnya pemahaman perangkat Kelurahan tentang administrasi pemerintahan.
- e) Belum maksimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan Desa.
- f) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban antara lain :

- a) Lemahnya pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
- b) Lemahnya penertiban PKL
- d) Lemahnya pemahaman tentang peraturan per Undang-Undangan.
- e) Tindak kriminal cenderung meningkat
- f) Kesadaran masyarakat tentang hukum masih rendah.
- g) Pengetahuan masyarakat tentang antisipasi bencana masih rendah.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

- a) Belum tercipta iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif sebagai tolok ukur kemampuan ekonomi masyarakat.
- b) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- c) Terbatasnya pemberian stimulant pembangunan Desa dan Dusun.
- d) Belum optimalnya potensi daerah yang harus dikelola.
- e) Data kemiskinan yang kurang valid.
- f) Kurang optimalnya penggunaan bantuan pemberdayaan masyarakat.
- g) Penyusunan Siklus tahunan Desa dan APBDes tidak tepat waktu.
- h) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan Desa.
- i) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembangunan desa

5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesejahteraan Masyarakat antara lain :

- a) Kurangnya peranserta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
- b) Belum tertanganinya masalah-masalah sosial masyarakat.
- c) Penanganan kesehatan masyarakat belum optimal.
- d) Perlu pengembangan kesenian di masyarakat.
- e) Belum optimalnya pelestarian adat budaya dan tradisi masyarakat

6. Seksi Pelayanan Umum

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan Umum antara lain:

- a) Masih lemahnya validitas data kependudukan.
- b) Lemahnya pemahaman mempunyai KTP dan KK
- c) Semakin tingginya pelayanan publik yang harus ditangani.
- d) Peningkatan jumlah penduduk dan masuk penduduk
- e) Jaringan perekaman data SIAK yang sering terganggu.
- f) Kurang lengkapnya persyaratan permohonan ijin- ijin.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah guna meningkatkan kapasitas pegawai perlu dilakukan bimbingan, motivasi, inovasi yang tinggi untuk mendukung itu diperlukan diklat dan kursus ilmu teknologi modern, serta untuk meningkatkan pelayanan sangat diperlukan infrastruktur sarana dan prasarana yang cukup guna menunjang kelancaran kerja.

D. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis dalam penyusunan prioritas tahun yang direncanakan:

- a. Perlu adanya tuntutan untuk melaksanakan perubahan tata kelola pemerintahan dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang berpotensi.
- b. Perlu adanya pendelegasian kewenangan yang dapat dilakukan oleh Kecamatan, walaupun sebenarnya sudah ada kewenangan yang bersifat atributif tetapi masih perlu diikuti kewenangan delegatif.
- c. Perlu adanya arah kebijaksanaan yang jelas terhadap pengembangan dan penataan wilayah terutama pada titik-titik pembangunan wilayah sesuai dengan pengembangan dan peruntukannya.
- d. Perubahan fungsi lahan yang sangat pesat mengingat Kecamatan Denpasar Selatan merupakan daerah pengembangan kawasan perkotaan yang mengalami perkembangan sangat pesat sehingga perlu inovasi baru dalam penanganannya dengan teknologi yang ada.

- e. Infrastruktur sarana dan prasarana yang ada masih belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan sehingga masih perlu untuk ditingkatkan pembangunannya.
- f. Peluang kerja dan lapangan kerja yang ada cukup banyak tetapi tidak diimbangi dengan keahlian dan ketrampilan bagi calon pencari kerja, sehingga perlu adanya diklat bagi calon pencari kerja.
- g. Angka kemiskinan di Kecamatan Denpasar Selatan masih cukup tinggi dan masih perlu penanganan yang serius, sehingga pendampingan dari stakeholder sangat diharapkan baik bimbingan, pelatihan dan penguatan modal usaha bagi KK miskin.

BAB. III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Sosial Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan sekretariat Dinas Sosial Kota Denpasar.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial dalam Tahun 2024 tetap mengacu pada sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar maupun Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar, yang mana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan, adapun Rencana Kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial pada tahun sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Denpasar

Kecamatan Denpasar Selatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu APBD Induk 2024 (Rp)	Pagu Rencana Perubahan 2024 (Rp)	Bertambah /Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
7					URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN					
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	15,997,289,475	16,844.018.961	233,182,776
7	01	01	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	13,895,572,291	14.509.119.001	-
7	01	01	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	13,895,572,291	14.509.119.001	-

7	01	01	02.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-	-
										-
7	01	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	410,578,400	302,044,400	(108,534,000)
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,676,000	5,676,000	-
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	303,866,500	228.311.500	(75.555.000)
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 paket	88,435,900	59,416,900	(29,019,000)
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	12,600,000	8.640.000	(3.960.000)
										-

7	01	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	8,925,000	42,139,000	33,214,000
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8,925,000	42,139,000	33,214,000
										-
7	01	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,342,043,784	1,575,226,560	233,182,776
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	132,600,000	132,600,000	-
7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	-	-	-
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,209,443,784	1,442,626,560	233,182,776
										-

7	01	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	340,170,000	415,490,000	75,320,000
7	01	01	02.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45,860,000	45,860,000	-
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	187,280,000	157,800,000	(29,480,000)
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20,000,000	141,000,000	121,000,000
7	01	01	02.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	87,030,000	70,830,000	(16,200,000)

										-
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan	83%	361,069,250	633.112.250	272.043.000
7	01	02	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat	100%	214,763,250	486.806.250	272.043.000
7	01	02	02.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrencom)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	48,350,250	48,350,250	-
7	01	02	02.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	166,413,000	483.456.000	272.043.000
										-
7	01	02	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Survey Kepuasan Masyarakat	100%	146,306,000	146,306,000	-

7	01	02	02.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (PATEN DII)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	146,306,000	146,306,000	-
										-
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	58,490,950	58,490,950	-
7	01	04	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	58,490,950	58,490,950	-
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	58,490,950	58,490,950	-
										-
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	187,978,150	1,102,002,150	914,024,000

8	01	05	02.01		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100%	187,978,150	1,102,002,150	914,024,000
9	01	05	02.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	160,978,150	1,075,002,150	914,024,000
9	01	05	02.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	27,000,000	27,000,000	-
										-
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	100%	15,825,000	15,825,000	-

8	01	06	02.01		Failitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	15,825,000	15,825,000	-
9	01	06	02.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	15,825,000	15,825,000	-
Total								16,620,652,825	18.653.449.311	2.032.796.486

Kelurahan Pedungan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu APBD Induk 2024 (Rp)	Pagu Rencana Perubahan 2024 (Rp)	Bertambah /Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
7					URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN					
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1,916,188,517	1,916,912,201	723,684
7	01	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	193,062,450	193,062,450	-
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,029,000	3,029,000	-
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	154,805,500	154,805,500	-

7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 paket	24,787,950	24,787,950	-
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	10,440,000	10,440,000	-
										-
7	01	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	50,800,000	50,800,000	-
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50,800,000	50,800,000	-
										-
7	01	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,399,871,692	1,400,595,376	723,684
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	51,000,000	51,000,000	-

7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,440,000	1,440,000	-
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,347,431,692	1,348,155,376	723,684
										-
7	01	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	272,454,375	272,454,375	-
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	86,753,000	87,137,575	384,575
	01	01	02.10	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	1,200,000	900,000	(300,000)
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	160,551,375	163,696,800	3,145,425

7	01	01	02.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	23,950,000	20,720,000	(3,230,000)
										-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	839,752,100	888,594,100	48,842,000
7	01	03	02.02		Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	839,752,100	888,594,100	48,842,000
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,535,450	2,535,450	-
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	350,000,000	398,842,000	48,842,000
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	487,216,650	487,216,650	-

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	194,828,600	194,828,600	-
7	01	04	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	194,828,600	194,828,600	-
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	194,828,600	194,828,600	-
										-
Total								2,950,769,217	3,000,334,901	49,565,684

Kelurahan Sesean

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu APBD Induk 2024 (Rp)	Pagu Rencana Perubahan 2024 (Rp)	Bertambah /Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
7					URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN					
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1,767,843,136	2,208,052,632	440,209,496
7	01	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	139,596,800	139,596,800	-
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2,702,000	2,702,000	-
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	102,269,500	102,269,500	-

7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 paket	24,185,300	24,185,300	-
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	10,440,000	10,440,000	-
										-
7	01	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	-	7,875,000	7,875,000
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	7,875,000	7,875,000
										-
7	01	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,536,526,336	1,540,860,832	4,334,496

7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	78,000,000	82,150,000	4,150,000
7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	9,000,000	9,000,000	-
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,449,526,336	1,449,710,832	184,496
										-
7	01	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	91,720,000	519,720,000	428,000,000
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	67,460,000	70,460,000	3,000,000

7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	4,260,000	4,260,000	-
7	01	01	02.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	20,000,000	445,000,000	425,000,000
										-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	731,706,150	716,681,150	(15,025,000)
7	01	03	02.02		Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	731,706,150	716,681,150	(15,025,000)
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,971,950	2,971,950	-
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	350,000,000	350,000,000	-

Renja Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan 2024

7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	378,734,200	363,709,200	(15,025,000)
										-
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	207,529,600	207,529,600	-
7	01	04	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	207,529,600	207,529,600	-
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	207,529,600	207,529,600	-
										-
Total								2,707,078,886	3,132,263,382	425,184,496

Kelurahan Serangan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu APBD Induk 2024 (Rp)	Pagu Rencana Perubahan 2024 (Rp)	Bertambah /Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
7					URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN					
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1,186,700,510	1,186,766,630	66,120
7	01	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	158,393,950	158,393,950	-
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,789,000	3,789,000	-
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	112,318,000	112,318,000	-

7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 paket	31,846,950	31,846,950	-
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	10,440,000	10,440,000	-
										-
7	01	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	33,054,000	33,054,000	-
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	33,054,000	33,054,000	-
										-
7	01	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	869,986,560	870,052,680	66,120

7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	52,910,400	52,910,400	-
7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	500,000	500,000	-
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	816,576,160	816,642,280	66,120
										-
7	01	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	125,266,000	125,266,000	-
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	68,428,000	68,428,000	-
	01	01	02.10	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	960,000	960,000	-

7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	22,388,000	22,388,000	-
7	01	01	02.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	33,490,000	33,490,000	-
										-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	815,452,600	815,452,600	-
7	01	03	02.02		Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	815,452,600	815,452,600	-
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,685,000	2,685,000	-
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	384,774,800	384,774,800	-

7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	427,992,800	427,992,800	-
										-
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	173,492,600	173,492,600	-
7	01	04	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	173,492,600	173,492,600	-
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	173,492,600	173,492,600	-
										-
Total								2,175,645,710	2,175,711,830	66,120

Kelurahan Panjer

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu APBD Induk 2024 (Rp)	Pagu Rencana Perubahan 2024 (Rp)	Bertambah /Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
7					URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN					
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1,264,644,664	1,265,925,604	1,280,940
7	01	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	140,549,000	140,549,000	-
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4,941,000	4,941,000	-
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	101,073,000	101,073,000	-
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	24,095,000	24,095,000	-

Rencana Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan 2024

7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	10,440,000	10,440,000	-
										-
7	01	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	-	-	-
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-	-
										-
7	01	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	935,505,664	936,786,604	1,280,940
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	64,800,000	64,800,000	-

7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	525,000	525,000	-
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	870,180,664	871,461,604	1,280,940
										-
7	01	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	188,590,000	188,590,000	-
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	49,550,000	49,550,000	-
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	139,040,000	139,040,000	-

7	01	01	02.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit			-
										-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	802,438,300	802,438,300	-
7	01	03	02.02		Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	802,438,300	802,438,300	-
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,030,000	2,030,000	-
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	373,780,000	373,780,000	-
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	426,628,300	426,628,300	-

										-
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	185,044,650	185,044,650	-
7	01	04	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	185,044,650	185,044,650	-
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	185,044,650	185,044,650	-
										-
Total								2,252,127,614	2,253,408,554	1,280,940

Kelurahan Renon

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu APBD Induk 2024 (Rp)	Pagu Rencana Perubahan 2024 (Rp)	Bertambah /Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
7					URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN					
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1,210,408,148	1,194,477,648	(15,930,500)
7	01	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	119,054,700	116,995,700	(2,059,000)
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1,858,000	1,858,000	-
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	87,067,500	85,008,500	(2,059,000)
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19,689,200	19,689,200	-

Renja Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan 2024

7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	10,440,000	10,440,000	-
										-
7	01	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	104,000,000	99,000,000	(5,000,000)
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	104,000,000	99,000,000	(5,000,000)
										-
7	01	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	902,565,448	893,693,948	(8,871,500)
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	75,600,000	66,000,000	(9,600,000)

7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	30,798,000	30,798,000	-
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	796,167,448	796,895,948	728,500
										-
7	01	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	84,788,000	84,788,000	-
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	56,948,000	56,948,000	-
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	27,840,000	27,840,000	-

7	01	01	02.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit			-
								-	-	-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	801,641,685	868,095,064	66,453,379
7	01	03	02.02		Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	2,293,950	2,293,950	-
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	350,112,685	416,566,064	66,453,379
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	449,235,050	449,235,050	-

7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			-
								222,531,150	238,461,650	15,930,500
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	222,531,150	238,461,650	15,930,500
7	01	04	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	222,531,150	238,461,650	15,930,500
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan			-
								-	-	-
Total								2,234,580,983	2,301,034,362	66,453,379

Kelurahan Sanur

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu APBD Induk 2024 (Rp)	Pagu Rencana Perubahan 2024 (Rp)	Bertambah /Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
7					URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN					
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1,250,191,060	1,256,440,660	6,249,600
7	01	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	155,349,700	155,349,700	-
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,020,500	3,020,500	-
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	115,493,000	115,493,000	-
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	1 paket	26,396,200	26,396,200	-

7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	10,440,000	10,440,000	-
										-
7	01	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	-	457.622.000	457.622.000
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	457.622.000	457.622.000
										-
7	01	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,005,659,360	972,128,768	(33,530,592)
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	65,100,000	65,100,000	-

7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,480,000	1,480,000	-
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	939,079,360	905,548,768	(33,530,592)
										-
7	01	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	89,182,000	136,182,000	47.000.000
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	57,642,000	57,642,000	-
	01	01	02.10	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	1,380,000	1,380,000	-
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	8,200,000	55,200,000	47.000.000

7	01	01	02.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	21,960,000	21,960,000	-
										-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	619,763,500	629.004.500	9.241.000
7	01	03	02.02		Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	619,763,500	629.004.500	9.241.000
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	1,438,000	1,438,000	-
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	350,000,000	359.241.000	9.241.000
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	268,325,500	268,325,500	-

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	175,750,200	169,500,600	(6,249,600)
7	01	04	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	175,750,200	169,500,600	(6,249,600)
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	175,750,200	169,500,600	(6,249,600)
										-
Total								2,045,704,760	2.519.787.568	474.082.808

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan.

Dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Denpasar Selatan melaksanakan 6 (enam) program dengan 11 (Dua belas) kegiatan dan 28 (Dua puluh delapan) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 34.035.989.908,-

Rencana Rancangan Program Kerja Kecamatan Denpasar Selatan ini merupakan program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Selatan pada periode tahun 2024. Rencana Program ini hanya merupakan program Kecamatan Denpasar Selatan, sedang pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan Kecamatan di Kota Denpasar. Dengan demikian, Rencana Program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses Kecamatan Denpasar Selatan dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Denpasar, 8 Mei 2024
Plt. Camat Denpasar Selatan

Ketut Sri Karvawati, S.KM.,M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19710626 199402 2 001